

Representasi Jurnalisme Damai terhadap Pemberitaan Pemulangan Wni Eks-Isis di Media Daring

Febrian Hafizh Muchtamar, Doddy Iskandar Cakranegara

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

febrianhafizhm@gmail.com

Abstract— In February, Indonesian ex-ISIS citizens in Syria asked to be returned to Indonesia. Suddenly, the media positioned them as citizens who had betrayed the country, who did not deserve to return home. Although the dominance of the media considers this, several media also support the repatriation of Indonesian citizens of the ISIS-ISIS network, one of which is Tirto. This research will focus on Tirto, framing the issue of returning ex-ISIS citizens. This study uses a qualitative method with the Framing model analysis approach of Robert N. Entman. The primary data source is news of the return of ex-ISIS citizens on the online media Tirto.id. Secondary data can be obtained through informant interviews, books, scientific reports, and internet data. Data collection techniques through documentation study and literature study. The data analysis technique is carried out with the Entman framing analysis model which consists of defining problems (defining problems), estimating problems (diagnosing causes), making moral decisions (making moral judgments), and emphasizing problem solving (treatment recommendation). The results of the Entman framing method were analyzed using the Peace Journalism method by Johan Galtung, which is oriented towards peace, society, truth, and settlement. The results of this study, however, concluded that Tirto applied peaceful journalism in reporting on the repatriation of ex-ISIS citizens.

Keywords— *Online Media, Returning Ex-ISIS Indonesian Citizens, Framing, Peaceful Journalism*

Abstrak— Pada Februari lalu, WNI Eks-ISIS yang berada di Suriah meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Sontak, media menempatkan mereka sebagai warga yang telah mengkhianati negara, yang tidak layak pulang. Meski dominasi media menganggap demikian, beberapa media juga mendukung pemulangan WNI Eks-ISIS, salah satunya Tirto. Penelitian ini akan berfokus pada Tirto yang membingkai isu pemulangan WNI Eks-ISIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis Framing model Robert N. Entman. Sumber data primer adalah berita pemulangan WNI Eks-ISIS di media daring Tirto.id. Data sekunder di dapat melalui wawancara informan, buku, laporan ilmiah, dan data internet. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan yang dilakukan menggunakan model analisis Framing Entman, yang terdiri atas pendefinisian masalah (define problems), perkiraan masalah (diagnose causes), pembuatan keputusan moral (make moral judgement), dan penekanan penyelesaian masalah (treatment recommendation). Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan Tirto menerapkan jurnalisme damai dalam

pemberitaan pemulangan WNI Eks-ISIS.

Kata Kunci— *Media Daring, Pemulangan WNI Eks-ISIS, Framing, Jurnalisme Damai*

I. PENDAHULUAN

Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) menjadi perhatian masyarakat dunia, karena propaganda ekstrim yang mengancam keamanan dan perdamaian di bumi. ISIS memiliki wacana mengubah tatanan dunia dengan keyakinan Islam, artinya semua negara menganut paham khalifah. Salah satu upaya ISIS merealisasikan wacana tersebut, dengan mengajak penganut Islam di seluruh dunia melakukan jihad.

ISIS lahir sekitar tahun 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Kemunculan ISIS dinilai sama dengan hadirnya Al-Qaida. Al-Qaida bermula saat pembebasan Afghanistan dari pengaruh komunis serta kedaultan Rusia (Uni Soviet) pada dekade 1900-an. Pada saat itu, Amerika Serikat (AS) memberi sokongan senjata dan pelatihan militer terhadap warga Afghanistan. Namun, pasca perang dingin (*Cold War*), warga Afghanistan malah membuat suatu ideologi karena hegemoni Barat terhadap kelompok Muslim.

Dalam memproyeksikan visinya, ISIS dimudahkan dengan kehadiran teknologi. Pada zaman itu pula teknologi sudah cukup maju. ISIS memanfaatkan teknologi untuk memancarkan propagandanya, seperti lewat media sosial. Berkat hal itu, ISIS mampu menarik perhatian umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk ikut berjihad. Gerakan ISIS bukan lagi berbasis lokal, tetapi sudah menyambar secara internasional. Hal ini tidak terlepas dari keahlian ISIS dalam mengoperasikan teknologi komunikasi secara efektif.

Jika menarik lebih awal, kemunculan ISIS ditenggarai pasca *Nine Eleven* (911). Peristiwa tersebut mengembangkan lanskap terorisme global. Menurut Chandler dan Gunaratna, terdapat tiga perkembangan penting dinamika politik dan keamanan dunia pasca peristiwa 911. Pertama, perubahan Al-Qaida. Kedua, Irak menjadi *the land of jihad*. Lalu, ketiga simpati dari masyarakat Muslim di seluruh dunia, atas narasi kebencian terhadap Amerika Serikat serta dominasi negara Barat.

Sikap desktruktif ISIS, bagi simpatisannya dianggap hal yang mulia. Namun dunia menganggap sebagai ancaman global. Dorongan ini tentu tidak lepas dari peran media massa. Sikap media tidak semua sama, ada yang ingin menghentikan konflik atas dasar agama ini dengan perdamaian, dan ada juga yang memperuncing bahkan menyuburkan label *Islamophobia*. *Islamophobia* adalah prasangka buruk terhadap agama Islam dan penganutnya, sehingga akan mengganggu stabilitas hidup umat Muslim.

Beberapa waktu lalu, ISIS akhirnya runtuh. Zack Beauchamp dari Vox mengemukakan dua alasan kemunduran ISIS. Pertama, sifat ISIS yang eksklusif. ISIS tidak mau bekerjasama dengan kelompok antirezim Bashar Al-Assad. Kedua, memusuhi semua pihak dari negara Barat bahkan Timur Tengah. Kehancuran ISIS membuat beberapa simpatisannya mengungsi. Menurut laporan ABC, pengungsi mayoritas anak-anak dan perempuan. Para pengungsi berasal dari berbagai negara, termasuk simpatisan dari Indonesia.

Media ramai-ramai membicarakan nasib para pengungsi. Apakah harus dipulangkan atau dibiarkan saja. Suburnya *Islamophobia*, beberapa media menolak memulangkan WNI Eks-ISIS. Namun bagi Tirto, simpatisan ISIS asal Indonesia atau mereka menyebutnya WNI Eks-ISIS harus dipulangkan. Bingkai atau *Framing* dari Tirto adalah WNI Eks-ISIS memiliki hak pulang, negara tidak boleh membiarkan warganya dalam bahaya. Dalam seri berita ISIS, Tirto memberi judul "Mengapa WNI Eks-ISIS Harus Dipulangkan dan Diadili di Indonesia?" sebagai indikasi sikap terhadap permasalahan ini.

Tirto memiliki rekam jejak yang acap kali bertentangan dengan pemahaman agama bagi beberapa orang. Salah satunya mendukung LGBT, membongkar kasus pelecehan seksual greja, dan lain sebagainya. Pada permasalahan WNI Eks-ISIS, Tirto malah membingkai sebaliknya: memulangkan orang radikal. Cukup terlihat jelas, bahwa benang merah dari segala pemberitaan Tirto adalah hak asasi manusia (HAM). Bingkai yang dibuat Tirto bisa merujuk pada prinsip jurnalisme damai (*Peace Journalism*).

Dari penjelasan konteks di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bingkai pemberitaan Tirto tentang pemulangan WNI Eks-ISIS. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap apakah Tirto membingkai WNI Eks-ISIS harus pulang sebagai prinsip jurnalisme damai karena hak asasi manusia.

Dari konteks penelitian yang dijabarkan, maka fokus penelitiannya yaitu: "Bagaimana bingkai berita mengenai representasi jurnalisme damai dalam Pemulangan WNI Eks-ISIS oleh Tirto?" Peneliti menggunakan model analisis *framing* dari Robert N. Entman dalam merangkai pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Define Problems* mengenai representasi jurnalisme damai dalam pemulangan WNI Eks-ISIS oleh Tirto.id?
2. Bagaimana *Diagnosis Causes* mengenai

representasi jurnalisme damai dalam pemulangan WNI Eks-ISIS oleh Tirto.id?

3. Bagaimana *Make Moral Judgment* mengenai representasi jurnalisme damai dalam pemulangan WNI Eks-ISIS oleh Tirto.id?
4. Bagaimana *Treatment Recommendation* mengenai representasi jurnalisme damai dalam pemulangan WNI Eks-ISIS oleh Tirto.id?

II. LANDASAN TEORI

A. Berita

Kapan dan di mana saja, sebuah peristiwa pasti terjadi. Jika peristiwa termasuk dalam berita, maka peristiwa tersebut harus ditulis, disunting, dan disebarluaskan secara luas serta umum. Lalu, apa yang dimaksud dengan berita sesungguhnya? Berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi, menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa. (Onong U. Effendi, dalam Kamus Komunikasi).

B. Nilai Berita

Pada setiap berita, terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai berita sulit disebut sebagai hal yang konkret. Hal ini adalah konsep, yang pada dasarnya dirasakan oleh komunikan. Dalam *Jurnalisme Kontemporer* (Septiawan, 2005:18-20) menjelaskan elemen dalam nilai berita, yakni:

1. *Immediacy*

Hal ini kerap diistilahkan dengan *timelines*. Artinya terkait dengan kesegaran peristiwa yang diberitakan. Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan yang baru saja terjadi. Unsur waktu amat penting disini.

2. *Proximity*

Proximity adalah keterdekatan peristiwa dengan pembaca. Khalayak berita akan tertarik dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dekatnya. Unsur inilah yang menggambarkan keberhasilan surat kabar lokal yang memiliki kedekatan dengan memberitakan peristiwa yang terjadi di daerahnya.

3. *Consequence*

Berita yang mengubah kehidupan pembaca adalah berita yang mengandung nilai konsekuensi. Seperti misalnya berita kenaikan harga bahan bakar minyak yang nantinya akan mengubah pengeluaran hidup.

4. *Conflict*

Peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi, atau kriminal, merupakan contoh elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan antar individu atau antar kelompok merupakan elemen-elemen natural dari berita-berita yang mengandung konflik.

5. *Oddity*

Peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan diperhatikan segera oleh masyarakat.

6. *Sex*

Seks kerap menjadi suatu elemen utama dari sebuah pemberitaan. Tapi, seks sering pula menjadi elemen

tambahan bagi pemberitaan tertentu. Berbagai berita artis hiburan banyak dibumbui dengan elemen seks.

7. *Emotion*

Elemen ini kadang dinamakan dengan elemen human interest. Elemen ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, ambisi, simpati, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor. Elemen emotion sama dengan komedi, atau tragedi.

8. *Pro minance*

Elemen ini adalah unsur yang menjadi dasar istilah "names make news", nama membuat berita. Ketika seseorang menjadi terkenal, maka ia akan diburu para pembuat berita. Beberapa tempat, pendapat, dan peristiwa juga masuk ke dalam elemen ini.

9. *Suspense*

Elemen ini menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Namun, elemen ketegangan ini tidak terkait dengan paparan kisah berita yang berujung pada klimaks kemisterian. Kisah berita yang menyampaikan fakta-fakta tetap merupakan hal yang penting.

10. *Progres*

Elemen ini merupakan elemen "perkembangan" peristiwa yang ditunggu masyarakat.

C. *Kebenaran Berita*

1. **Kebenaran Berita** Bagian yang penting dari berita dilenyapkan wartawan, dengan maksud pembaca tidak membaca informasi tersebut.
2. Bagian yang tidak penting dibesar-besarkan kepentingannya; hal yang besar artinya, dkecilkan; yang seharusnya pendek dipanjangkan.
3. Melenyapkan seluruh berita agar publik tidak mengetahui, dan menyiarkan berita yang bertentangan demi keuntungan semata.
4. Memalsukan berita kejadian dengan membuat berita untuk maksud tertentu.
5. Memakai cara yang tidak adil untuk menyesatkan anggapan pembaca terhadap suatu permasalahan, tokoh, atau politik.

D. *Jurnalisme Daring*

Peradaban semakin maju. Beberapa aspek kehidupan pun menempuh perubahan. Hal itu pun dialami dunia jurnalisme. Zaman dulu, jurnalisme tradisional hanya berbasis cetak, serta distribusi yang masih lambat. Deuze menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme daring dengan media tradisional terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan *cyber*. "Online journalism harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlinks*" (Santana, 2005: 137).

E. *Ideologi Media*

Pada umumnya dapat diterima pandangan yang mengatakan bahwa teks media mengartikulasikan secara terpadu (*coherent*) gagasan-gagasan tentang bagaimana cara memandang dan/atau memahami realitas. Media massa, melalui berbagai jenis sajian pesan, menawarkan cara pandang mengenai berbagai hal termasuk misalnya cara memandang kelompok etnis dan/ atau budaya tertentu, perempuan, pemimpin, atau masyarakat.

Kajian mengenai ideologi media, karena ini, dapat dikatakan berkenaan dengan citraan (*images*) atau representasi mengenai realitas masyarakat yang ditampilkan oleh media dalam berbagai kemasan pesan yang notabene adalah pendefinisian realitas dengan cara tertentu dengan menggunakan perangkat sistem lambang. Hal ini berarti bahwa ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung oleh media massa melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak entah itu berupa paket berita, iklan, film, tayangan sinetron, atau tayangan *reality show*. Ideologi media tampak secara implisit berupa sistem makna terkandung dalam sistem-sistem lambang yang dapat membantu mendefinisikan dan/atau menjelaskan realitas walau kerap kali bias, serta memberikan acuan bagi publik untuk berpikir, bersikap, dan memberikan merespon. Dengan kata lain konsep ideologi media sangat lekat dengan konsep-konsep lain seperti sistem keyakinan (*belief system*), prinsip gagasan (*basic way of thinking*), pandangan dunia (*worldviews*), dan nilai (*values*) yang diusung oleh media.

F. *Konstruksi Realitas*

Sebuah berita yang diproduksi oleh jurnalis tidak semata-mata memindahkan suatu realitas ke dalam bentuk berita. Setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, dan semuanya secara potensial menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan mana yang bukan berita (Eriyanto, 2002:119).

G. *Konstruksi Sosial Media Massa*

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Bersama Thomas Luckman, ia banyak mengembangkan aliran ini dengan banyak menulis karya dan tesis mengenai konstruksi sosial dan realita. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal dalam masyarakatnya. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan, Berger dalam Eriyanto (2002 : 16-17) menyebutnya sebagai momen.

H. *Framing*

Dalam menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek dari realitas, media menggunakan

konsep pembingkai (framing). Framing menempatkan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain (Nugroho, Eriyanto, Sudriarasis, 1999:20).

I. *Jurnalisme Damai*

Jurnalisme damai adalah upaya pertanyaan kritis wartawan, tentang apa sebenarnya manfaat dari aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik, dengan menerapkan prinsip pada kebenaran, masyarakat, perdamaian dan penyelesaian masalah.

Profesor Johan Galtung membentuk petunjuk praktis pertama yakni Manual Jurnalisme Damai setelah dialog dan konferensi di beberapa negara. Apa yang diperjuangkan jurnalis damai:

1. Menghindari penggambaran konflik sebagai dua pihak yang memperebutkan satu tujuan. Hasil yang mungkin adalah salah satu menang dan yang lain kalah. Sebaiknya jurnalis damai akan memecah kedua pihak menjadi beberapa kelompok kecil, mengejar beberapa tujuan, membuka selang hasil yang lebih kreatif dan potensial.
2. Menghindari menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Hal ini dapat digunakan untuk membangun rasa bahwa pihak lain merupakan ancaman atau memiliki sikap yang di luar batas.
3. Menghindari memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang hanya terjadi di tempat dan waktu di mana konsekuensi bagi orang di tempat lain pada saat itu dan di masa depan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Analisis Framing Berita Tirto 1*

Judul : DPR Minta Pemerintah Fokus ke Corona dan BPJS Daripadi WNI Eks-ISIS

Terbit : 7 Februari 2020

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Berita berjudul “DPR Minta Pemerintah Fokus ke Corona dan BPJS Daripadi WNI Eks-ISIS” (7 Februari 2020) adalah DPR meminta pemerintah memprioritaskan masalah BPJS Kesehatan dan pencegahan virus corona, ketimbang mengurus kepulangan WNI Eks-ISIS. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan hal itu melihat dua masalah tersebut bersifat genting, daripada WNI Eks-ISIS.

TABEL 1. STURUKTUR BERITA TIRTO 1

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
DPR Minta Pemerintah Fokus ke	Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sufmi	Ia memberi contoh bahwa Badan	Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI

Corona dan BPJS Daripadi	Dasco Ahmad, meminta pemerintah memprioritaskan masalah BPJS Kesehatan dan antisipasi virus corona ketimbang pemulangan WNI Eks ISIS.	Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggarisbawahi pentingnya upaya pembinaan, apabila WNI bekas ISIS dipulangkan. Namun, Fachrul menilai proses pembinaan bukan persoalan mudah karena mantan anggota kelompok bersenjata ISIS sudah terpapar paham yang sangat radikal.	Fraksi paratari Gerindra), Facrul Razi (Menteri Agama)
--------------------------	---	--	--

Judul dan *Lead* dari berita ini adalah WNI Eks-ISIS tidak perlu dirisaukan, karena tidak sepenting masalah BPJS Kesehatan dan virus corona.

Tirto belum memperlihatkan itikad untuk mendamaikan masalah ini. Terlihat pada judul hingga *Lead* tidak memprioritaskan WNI Eks-ISIS. Padahal anggapan itu keliru, ketiganya sama-sama penting. Prinsip damai adalah menyelesaikan masalah dengan tidak melupakan isu lainnya. Ketiga masalah tersebut kendatinya penting dan seharusnya bisa diselesaikan oleh beberapa kementerian dan lembaga.

Permasalahan WNI Eks-ISIS yang masih terdampar tidak ditunjukkan seberapa menderita mereka. Namun berita ini hanya memperlihatkan sisi pemerintah yang belum memutuskan bahkan condong tidak ingin memulangkan WNI Eks-ISIS. Tirto sebenarnya pernah menerbitkan berita terkait kondisi WNI Eks-ISIS pada 2019 berjudul “WNI Simpatisan ISIS di Suriah: ‘Kami Minta Bantuan Bisa Pulang’”.

Meski begitu, isi berita ini tidak mengandung opini, seluruh data murni dari ucapan narasumber tanpa subjektifitas jurnalis. Selain opini, berita ini tidak mengandung diksi “kita-mereka” yang bernada provokasi. Penyebutan kombatan ISIS dinamakan WNI Eks-ISIS, yang menurut peneliti adalah sikap Tirto untuk menekan bahwa mereka sudah bukan anggota ISIS, sehingga perlu dipulangkan.

Sementara itu, pemilihan narasumber hanya berada di lingkup pemerintah yang belum menentukan sikap terhadap WNI Eks-ISIS. Namun bukan berarti tidak menerapkan *cover both side*. *Cover both side*, menurut Eriyanto (2011: 290) adalah penempatan narasumber lebih dari satu yang memiliki pandangan berbeda. Tirto tidak menunjukkan itu dalam satu berita, tetapi menempatkan

narasumber lain di berita lain. Misalnya pada berita satu yang dibahas kali ini, hanya menunjukkan narasumber pemerintah. Untuk menerapkan prinsip *cover both side*, narasumber yang memiliki pandangan berbeda dihadirkan di berita selanjutnya.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Pemulangan WNI Eks-ISIS harus dikaji lebih dalam. Sebab, 660 mantan ISIS asal Indonesia tersebut perlu memperhatikan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Akar masalah pada pemberitaan ini adalah pemerintah kesulitan untuk menangani WNI Eks-ISIS. Ketidakmampuan pemerintah menjadi penyebab WNI Eks-ISIS tidak dipulangkan. Ketika nekat memulangkan, akan berakibat tindak teror beralih ke dalam negeri. Ini akan mengancam warga negara yang tidak terlibat.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Para WNI Eks-ISIS sudah terpapar paham yang sangat radikal. Menteri Agama (Menag), Facrul Razi mengatakan proses pembinaan tidak akan mudah.

Mantan kombatan ISIS Indonesia sudah terpapar paham radikal yang cukup parah, dan pembinaannya akan berlangsung sulit. Meski begitu, tidak ada pernyataan masalah ini akan dicabut dari tugas pemerintah. Hanya saja, perlu kajian lebih dalam untuk menyelesaikannya.

Pemerintah, kata Menag, bersinergi dengan berbagai unsur seperti lembaga swadaya masyarakat dan ormas keagamaan untuk membahas kemungkinan pemulangan WNI mantan ISIS. Lembaganya akan terus menggerakkan penguatan moderasi beragama dan toleransi. (Berita 1, paragraph 10)

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Tirto memecah dua persepsi. Antara ingin menghentikan proses pemulangan WNI Eks-ISIS atau malah sebaliknya. Pasalnya, berita ini menunjukkan dua kubu yang sama, antara Anggota DPR RI yang meminta permasalahan ini dihentikan, dan Menteri Agama (Menag) yang tetap berusaha menyelesaikan masalah. Pada berita ini, walaupun ditampilkan dengan judul "**DPR Minta Pemerintah Fokus ke Corona dan BPJS Daripadi WNI Eks-ISIS**", ucapan Menag untuk menyelesaikan masalah lebih dominan muncul.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada dimensi seleksi isu, Tirto menyantumkan dua narasumber yang berlainan sikap, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta persoalan WNI Eks-ISIS dihentikan, sedangkan Menag Facrul Razi menyatakan akan berusaha memulangkan.

Sedangkan pada dimensi penonjolan aspek realitas, Tirto memuat berita dengan judul **DPR Minta Pemerintah Fokus ke Corona dan BPJS Daripadi WNI Eks-ISIS**, yang merupakan terbitan perdana terkait

pemulangan WNI Eks-ISIS. Pada berita pertama, Tirto menonjolkan keinginan Anggota DPR RI untuk menghentikan masalah WNI Eks-ISIS, dan beralih menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan dan virus corona yang saat itu sudah mulai menyebar di Indonesia. Meski judul berita sudah menunjukkan sikap Tirto, kinerja dan keinginan Menag tetap dominan dalam isi berita.

B. *Analisis Framing Berita Tirto 2*

Judul : Dilema Jokowi Pulangkan WNI Eks-ISIS: Hitung Untung Rugi dan Risiko

Terbit : 7 Februari 2020

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Dilema Jokowi Pulangkan WNI Eks-ISIS: Hitung Untung Rugi dan Risiko adalah pribadi Jokowi yang menolak untuk memulangkan mereka. Namun, ia akan tetap mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait, untuk menentukan sikap mutlak. Tirto sudah mulai menentukan arah isu: mengkritik pemerintah yang dilematis.

TABEL 2. STURUKTUR BERITA TIRTO 2

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Dilema Jokowi Pulangkan WNI Eks-ISIS: Hitung Untung Rugi dan Risiko	Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri memberi isyarat untuk menolak pemulangan ratusan WNI eks-ISIS yang tak jelas nasibnya itu.	Sikap reaktif beberapa petinggi negara-- termasuk Presiden Jokowi-- yang memberi syarat untuk menolak memulangkan WNI eks-ISIS juga mendapat kritik. Hal tersebut lantaran pemerintah dianggap tak mampu menangani WNI yang pernah terpapar terorisme.	Facrul Razi (Menteri Agama), Joko Widodo (Presiden RI), Solahudin (Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI)), Riri Khariroh (Mantan Komisioner Komnas Perempuan)

Tirto menunjukkan petinggi negara yang dilematis sebagai sikap kontra terhadap pemerintah. Penyebutan kata "dilema" pada judul "**Dilema Jokowi Pulangkan WNI Eks-ISIS: Hitung Untung Rugi dan Risiko**" adalah itikad Tirto mendorong pemerintah memulangkan WNI Eks-ISIS. Judul tersebut berbentuk opini jurnalis, karena interpretasi atas ucapan narasumber. Terlihat dari ungkapan Jokowi pada dua paragraf berikut.

"Ratusan WNI eks organisasi Negara Islam di Iraq dan Suriah [ISIS] dikabarkan hendak kembali ke Tanah Air. Kemarin pun para wartawan bertanya kepada saya: bagaimana dengan mereka yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya? Kalau bertanya kepada saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak," kata Jokowi, hari ini (6/2/2020). (Berita 2, paragraf 9)

"Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas. Saya hendak mendengarkan pandangan dari jajaran pemerintah, kementerian, dan lembaga lain terlebih dahulu sebelum memutuskan. Semuanya harus dihitung-hitung plus minusnya," katanya. (Berita 2, paragraf 11)

Diksi yang terkandung tidak menunjukkan provokasi. Pasalnya, penggunaan kata "kita-mereka" hanya kata ganti. Selebihnya, mantan ISIS tetap dinamakan WNI Eks-ISIS sebagai penekanan bahwa mereka bukan lagi anggota ISIS.

Tirto menampilkan kerugian dari konflik, yaitu perempuan dan anak-anak dalam kondisi yang mengenaskan, kekurangan bantuan, serta acap kali berkelahi akibat berebut bantuan. Dari kalimat tersebut, Tirto berupaya melegitimasi bahwa WNI Eks-ISIS harus segera dipulangkan.

Riri sendiri pernah mendapat laporan dari UNHCR bahwa kondisi para perempuan dan anak-anak eks-ISIS di kamp sangat mengenaskan, kurang bantuan, dan kerap berkelahi akibat rebutan bantuan kemanusiaan. (Berita 2, paragraf 24)

Narasumber yang hadir pada berita ini tidak terlalu terlihat tendesius, karena Tirto mengakomodir semua pihak, yakni pemerintah yang memiliki wewenang, serta pengamat yang mendukung pemulangan WNI Eks-ISIS. Tirto terlihat memegang prinsip *cover both side*.

Pihak pemerintah hanya berkatat pada "harus didiskusikan", tidak lebih. Sedangkan dari pengamat terorisme maupun hak asasi manusia menyebutkan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Penyebab pemerintah tidak mau memulangkan WNI Eks-ISIS, menurut Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) Solahudin, pemerintah tidak punya kemampuan dan kapabilitas untuk mengurus para WNI Eks-ISIS ketika kembali ke Indonesia. Proses deradikalisasi yang baik dapat menentukan mantan ISIS tersebut keluar dari pemikiran ekstrim.

Sikap reaktif beberapa petinggi negara--termasuk Presiden Jokowi--yang memberi syarat untuk menolak memulangkan WNI eks-ISIS juga mendapat kritik. Hal tersebut lantaran pemerintah dianggap tak mampu menangani WNI yang pernah terpapar terorisme. (Berita 2, paragraf 27)

Peneliti melihat, permasalahan ini mempertaruhkan hidup dan mati warga negara akibat ulah negara sendiri. Bahkan ini juga bisa mempertaruhkan Indonesia di mata dunia. Tirto mencoba menggiring pernyataan pemerintah yang hanya berkatat pada "sedang didiskusikan" atau bahkan tidak dipulangkan sebagai sinyal ketidakmampuan.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Tahap pertama untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus memastikan warga negara masih berstatus WNI. Jika terbukti WNI, negara wajib melindunginya, tanpa memandang warganya sebagai orang

baik dan jahat – semua wajib dilindungi.

Tirto menyikapi isu ini dengan moralitas negara sebagai pelindung warganya. Negara harusnya melindungi warganya, tidak peduli baik atau jahat. Namun tampaknya negara acuh dengan warganya yang terpapar radikalisme, karena ketidakmampuan untuk menyembuhkan. Perkara doktrin tentu sulit dikembalikan ke bentuk normal, tetapi sikap acuh lebih berbahaya.

Jika dengan keadaan demikian pemerintah tetap menolak, Solahudin menilai negara tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan perlindungan ke WNI. Katanya, yang terbangun justru citra negara telah abai terhadap kewajibannya. (Berita 2, paragraf 15)

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Saat memutuskan memulangkan WNI, pemerintah lebih baik memilih mana yang layak untuk dipulangkan. Tirto memberikan solusi alternatif bagi pemerintah untuk meminimalisir resiko, bahwa kenyataannya pemerintah kesulitan menanggulangi WNI Eks-ISIS. Tirto mengakui para WNI Eks-ISIS sudah terlanjur memiliki pemikiran radikal ekstrim, sehingga perlu menyeleksi mana yang layak dipulangkan.

Selain itu, warga yang perlu diprioritaskan adalah anak-anak dan perempuan. Sejatinya mereka hanyalah korban dari ketimpangan kuasa di dalam keluarganya.

Mantan Komisioner Komnas Perempuan, yang fokus meneliti isu kekerasan ekstremisme perempuan, Riri Khariroh, juga menilai hal serupa. Ia mengatakan bahwa ada beberapa contoh negara yang telah berhasil memulangkan warga negaranya yang eks-ISIS, dan kebanyakan adalah golongan anak-anak. (Berita 2, paragraf 21)

Solusi tersebut, bagi peneliti adalah *win-win solution*. Bagi pemerintah, penanggulangan WNI Eks-ISIS akan lebih mudah, karena seleksi yang layak dipulangkan. Keputusan ini juga otomatis memenuhi prinsip hak asasi manusia para WNI Eks-ISIS.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto memasukkan fakta dan ungkapan dari dua kubu berbeda. Jokowi sebagai tokoh negara yang punya andil untuk menyelesaikan masalah ini, sedangkan para ahli Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI) Solahudin dan Mantan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Pada penonjolan aspek realitas, yakni Jokowi yang ditunjukkan sebagai orang yang dilematis. Posisinya sebagai presiden dipandang tidak punya pendirian. Bagi para ahli, pemulangan WNI Eks-ISIS dirasa perlu, dilihat dari jumlah ungkapan dominan dan data yang kuat, daripada ucapan Jokowi. Argumen para ahli bersandar pada negara yang harus melindungi warganya, tidak memandang baik buruknya seseorang. Pemerintah pun dinilai tidak punya kemampuan dan kapabilitas untuk

menangani masalah ini, karena hingga saat ini tidak ada laporan kinerja bahkan evaluasi penanggulangan terorisme.

C. Analisis Framing Berita Tirto 3

Judul : BNPT: Pemerintah Belum Tentukan Sikap Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS

Terbit : 7 Februari 2020

1. Define Problems (Pendefinisian Masalah)

TABEL 3. STURUKTUR BERITA TIRTO 3

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
BNPT: Pemerintah Belum Tentukan Sikap Soal Pemulangan	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks-ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI. BNPT kembali menegaskan pemerintah belum menentukan sikap untuk memulangkan atau tidak WNI tersebut.	Suhardi enggan menjawab apakah akan memulangkan WNI atau tidak. Ia juga tidak menjawab spesifik proses pemulangan apabila pemerintah mengembalikan eks pengikut ISIS ke Indonesia. Ia mengatakan, semua hal tersebut perlu dibahas sebelum pengambilan keputusan.	Komjen Suhardi Alius (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT))

Berita berjudul **BNPT: Pemerintah Belum Tentukan Sikap Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS** mempertunjukkan badan yang menanggulangi terorisme belum kunjung memutuskan perkara tersebut. Meskipun tidak ada sikap yang berubah, BNPT dibingkai positif dengan menunjukkan progresnya pada *Lead*.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius meluruskan informasi soal pemulangan WNI eks-ISIS. Saat ini, baru 100 dari 600-an WNI teridentifikasi sebagai WNI. BNPT kembali menegaskan pemerintah belum menentukan sikap untuk memulangkan atau tidak WNI tersebut. (Berita 3, paragraf 1)

Narasumber yang hadir hanya satu, yakni Kepala BNPT. BNPT sebagai pihak yang punya wewenang langsung terhadap kasus terorisme. Prinsip *cover both side* yang menyebut terdapat lebih dari satu narasumber, tidak diamini dalam berita ini. Namun sebenarnya Tirto mengamini prinsip tersebut, dengan menempatkan narasumber lain di berita berikutnya.

2. Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Sebenarnya pemerintah tidak menjawab masalah yang

tengah disikapinya. Bahkan tahap yang ditempuh untuk memverifikasi 100 WNI dari 600-an WNI tidak dijelaskan secara spesifik.

Suhardi enggan menjawab apakah akan memulangkan WNI atau tidak. Ia juga tidak menjawab spesifik proses pemulangan apabila pemerintah mengembalikan eks pengikut ISIS ke Indonesia. Ia mengatakan, semua hal tersebut perlu dibahas sebelum pengambilan keputusan. (Berita 3, paragraf 7)

Pada berita ketiga ini, pemerintah masih dibingkai nihil sikap terhadap masalah WNI Eks-ISIS. Kepala negara hingga BNPT pun masih dilematis dalam memulangkan WNI Eks-ISIS. Padahal sekitar 100 WNI sudah berhasil diidentifikasi.

3. Make Moral Judgment (Membuat Keputusan Moral)

Pemerintah sudah memverifikasi sekitar 100 WNI yang menjadi bagian ISIS di Suriah, dari total 600-an WNI. Ini adalah langkah progresif, walaupun keputusan dipulangkan belum ada. Setidaknya ini adalah harapan bagi publik melihat pemerintah bisa menangani masalah WNI Eks-ISIS. Tirto menunjukkan usaha pemerintah yang perlahan memperlihatkan sikapnya terhadap WNI Eks-ISIS.

4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Pemerintah akan mendiskusikannya dengan kementerian terkait dan aparat. Hingga berita ketiga ini, pemerintah belum kunjung memutuskan apakah akan memulangkan atau tidak. Meskipun begitu, berita ini memiliki sisi positif, bahwa pemerintah telah berhasil mengidentifikasi 100 WNI dari total 600-an WNI.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto hanya memasukkan narasumber tunggal, yakni Kepala BNPT. Sedangkan penonjolan aspek realitas, pada judul **BNPT: Pemerintah Belum Tentukan Sikap Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS**, Tirto menunjukkan pemerintah yang lambat menentukan sikap. Peneliti menyadari, meski Tirto menonjolkan pemerintah yang lambat menentukan sikap, Tirto juga memasukkan sisi positif, yakni pemerintah telah mengidentifikasi 100 WNI dari total 600-an WNI.

D. Analisis Framing Berita Tirto 4

Judul : Wapres Ma'ruf Diminta Segera Bertindak Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS

Terbit : 8 Februari 2020

1. Define Problems (Pendefinisian Masalah)

TABEL 4. STURUKTUR BERITA TIRTO 4

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Wapres Ma'ruf	Komisioner	Anam	Chairul Anam

Diminta Segera Bertindak Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS	Komnas HAM Chairul Anam mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus terlibat dalam proses pemulangan 600-an WNI eks-ISIS. Anam ber alasan, Wapres punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah tersebut.	mengatakan, Ma'ruf punya latar belakang mumpuni dalam berbicara agama. Ia merupakan petinggi Majelis Ulama Indonesia dan tokoh di Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).	(Komisioner Komnas HAM), Joko Widodo (Presiden RI)
---	--	--	--

Berita berjudul “**Wapres Ma'ruf Diminta Segera Bertindak Soal Pemulangan WNI**” adalah dorongan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang termasuk pada orientasi perdamaian. Konflik agama adalah permasalahan rumit di Indonesia. Hingga kini, sekitar 600 WNI Eks-ISIS sedang di ujung tanduk, sehingga perlu tindakan serius, salah satunya pendekatan agamis.

Pada bagian kata, tidak terdapat opini dari jurnalis. Setiap kata dan kalimat murni dari narasumber terkait. Sedangkan diksi “kita-mereka”, peneliti tekankan, hanya sebagai kata ganti, bukan seolah-olah tindakan provokasi.

Narasumber yang hadir terdiri dari dua pihak, yakni pemerintah dan pemerhati HAM. Porsi pemerintah lebih sedikit, karena berita ini adalah dorongan untuk memulangkan WNI Eks-ISIS.

2. **Diagnose Causes** (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Ma'ruf Amin memiliki jabatan strategis di instansi pemerintahan. Ia adalah Wakil Presiden, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Wakil Presiden mempunyai wewenang mengkoordinasikan kementerian lembaga, serta MUI dan PBNU sebagai koordinator dalam bidang keagamaan. Latar belakang Ma'ruf menjadi tolak ukur kemampuannya untuk menangani masalah pemulangan WNI Eks-ISIS.

3. **Make Moral Judgement** (Membuat Keputusan Moral)

Tirto membandingkan JK dengan Ma'ruf dengan kasus yang sama: isu agama. Peneliti melihat, JK bisa menyelesaikannya, sedangkan Ma'ruf belum bertindak apa-apa. Padahal WNI Eks-ISIS di Suriah sedang dihadapkan dengan hidup dan mati. Genjatan terus berkejolak di sana. Perbandingan empiris ini semakin menguatkan Ma'ruf harus ikut mengurus persoalan WNI Eks-ISIS.

"Ini persis kayak beberapa waktu lalu misal Pak JK, negara ini kok mendiskriminasi kelompok Islam. dikatakan teroris macam-macam. Akhirnya dia kumpulin semua ormas-ormas dipimpin Pak JK sendiri langsung bilang

enggak, tunjukkan video macam-macam akhirnya diam semua," kata Anam. (Berita 4, paragraf 5)

4. **Treatment Recommendation** (Menekankan Penyelesaian)

Komnas HAM yang menilai pemerintah bertele-tele dalam menyelesaikan masalah ini. Tirto menunjukkan bahwa masalah ini harus diambil alih oleh Ma'ruf.

"Makanya dengan peristiwa kemarin Menag ngomongnya apa, BNPT ngomongnya apa, Pak Menko ngomongnya apa, sudah saatnya ini diambil alih oleh Pak Wakil Presiden, bikin formulasi yang permanen," kata Anam. (Berita 4, paragraf 6)

Berdasarkan empat elemen Framing, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto menyematkan dua narasumber, yakni Komisioner Komnas HAM dan Presiden. Posisi Komisioner Komnas HAM ditunjukkan mengkritik dan solutif terhadap pemerintah. Sedangkan Presiden hanya mengatakan janjinya akan menyelesaikan masalah ini, dengan berdiskusi terlebih dahulu.

Pada penonjolan aspek realitas, berita dengan judul **Wapres Ma'ruf Diminta Segera Bertindak Soal Pemulangan WNI Eks-ISIS** menunjukkan Wapres Ma'ruf diminta turun tangan menyelesaikan masalah. Fakta-fakta tentang Ma'ruf sebagai wapres, PBNU, dan MUI serta perbandingan keberhasilan Wapres terdahulu JK pun turut dibandingkan.

E. *Analisis Framing Berita Tirto 5*

Judul : Komnas HAM Desak Seluruh WNI Eks ISIS Dipulangkan

Terbit : 8 Februari 2020

1. **Define Problems** (Pendefinisian Masalah)

TABEL 5. STURUKTUR BERITA TIRTO 5

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Komnas HAM Desak Seluruh WNI Eks ISIS Dipulangkan	Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mendesak pemerintah memulangkan seluruh WNI eks-ISIS.	Anam menerangkan, para WNI tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan saat menjadi bagian ISIS, karena ISIS bukan negara.	Chairul Anam (Komisioner Komnas HAM)

Sebagai badan penegak hak asasi manusia, memulangkan WNI Eks-ISIS adalah satu-satunya cara negara melindungi warganya. Ketidakmampuan pemerintah menanggulangi WNI Eks-ISIS, membuat Tirto memberi solusi alternatif lain, yakni pilih mana yang melakukan kejahatan dan mana yang tidak. Orang yang berperan dalam tindak terorisme, tetap perlu dipulangkan dan diadili di Indonesia.

"Kalau statusnya WNI ya dipulangkan, tapi diketati, dipilih. Mana yang memang melakukan kampanye ISIS, atau peran yang pengajaran penyebaran ideologi dan sebagainya, sampai orang yang melakukan kejahatan itu bisa diadili di Indonesia," Kata Chairul Anam di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2020). (Berita 5, paragraf 3)

Komnas HAM ditunjukkan sebagai narasumber tunggal. Tirto mencoba mengakomodir semua pihak, tetapi tidak selalu dalam satu berita. Biasanya satu pihak hadir dalam satu berita, pihak yang lainnya muncul di berita selanjutnya.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Pemerintah yang enggan memulangkan WNI Eks-ISIS, sebenarnya tidak punya dasar hukum. Para mantan kombatan terorisme ini tidak bisa kehilangan kewarganegaraannya akibat bergabung ISIS, karena ISIS bukanlah sebuah negara.

"Secara hukum belum ada alasan yang cukup kuat menganggap bahwa mereka bukan WNI, semua aturan soal kewarganegaraan baik undang-undangnya maupun peraturannya itu meletakkan kehilangan dan sebagainya dalam konteks dia negara asing," kata Anam. (Berita 5, paragraf 5)

Peneliti melihat, Tirto menunjukkan sebab yang konkrit, yakni dasar hukum. Indonesia tidak punya dasar hukum atas warganya yang bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrim, yang bukan berbentuk negara. Keinginan Tirto agar pemerintah memulangkan WNI Eks-ISIS semakin dikuatkan dengan argumen tersebut.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Ketika pemerintah sudah mengidentifikasi WNI, semuanya harus dikategorikan sesuai tindakannya. Beberapa WNI yang tergabung dengan ISIS, pasti tidak semua berperan melakukan aksi teror, propaganda, dan menyebarkan pemikiran radikal. Sebagian yang tergabung adalah korban

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Satu-satunya cara adalah memulangkan dan mengadili WNI Eks-ISIS di Indonesia. Ketidakinginan pemerintah memulangkan para mantan kombatan ISIS, tidak memiliki dasar hukumnya. Tirto juga menyebut dasar hukum dalam mengadili tindak terorisme.

Ia mengatakan, *Undang-Undang Terorisme terbaru, yakni pasal 12A dan pasal 12 B UU 5 tahun 2018, mengatur hukuman bagi tingkat keterlibatan seseorang dalam kasus terorisme.* (Berita 5, paragraf 8)

Memulangkan WNI Eks-ISIS adalah jalan satu-satunya. Hukum dasarnya jelas. Sebaliknya, jika tidak dipulangkan, dasar hukumnya nihil. Bahkan malah menjadi pelanggaran HAM negara kepada warganya.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto menyematkan narasumber

tunggal, yakni Komisioner Komnas HAM. Komnas HAM diposisikan sebagai pro terhadap kepulangan WNI Eks-ISIS.

Pada penonjolan aspek realitas, berita dengan judul **Komnas HAM Desak Seluruh WNI Eks ISIS Dipulangkan** sangat jelas memperlihatkan pembingkaiannya Tirto untuk mendorong pemerintah memulangkan WNI Eks-ISIS. Pada isi berita, landasan hukum sebagai argumentasi yang konkrit pun ditonjolkan.

F. *Analisis Framing Berita Tirto 6*

Judul : Mengapa 600 WNI Eks-ISIS Perlu Dipulangkan dan Diadili di Indonesia?

Terbit : 8 Februari 2020

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

TABEL 6. STURUKTUR BERITA TIRTO 6

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Mengapa 600 WNI Eks-ISIS Perlu Dipulangkan dan Diadili di Indonesia?	Otoritas Kurdi yang selama ini mengurus pengungsi eks ISIS pun mendesak dunia internasional untuk memulangkan warganya ke negara asal. Sikap tak acuh internasional dirasa menjadi beban, sebab mereka harus mengurus para pengungsi ketika mereka juga sedang memperbaiki kehidupannya.	Mantan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh mengungkapkan kondisi perempuan dan anak di pengungsian sangat memprihatinkan. Minimnya logistik membuat keributan jadi keseharian, bahkan seorang perempuan Indonesia ada yang tewas setelah dianiaya sesama wanita.	Abdul Karim Omar (Pejabat Kurdi), Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI), Riri Khariroh (Mantan Komisioner Komnas Perempuan), Khairul Fahmi (Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)), Suhardi Alius (Kepala BNPT), Mahfud MD (Menkopolkum)

Mengapa 600 WNI Eks-ISIS Perlu Dipulangkan dan Diadili di Indonesia? adalah judul berita akumulasi pelbagai argumen untuk memulangkan WNI Eks-ISIS. Judul berita memperlihatkan keharusan pemerintah untuk memulangkan WNI Eks-ISIS.

Para WNI Eks-ISIS yang tengah mengungsi sedang di ujung tanduk. Kondisi di pengungsian tidak menentu, bahkan yang mengungsikannya sudah kesulitan menangani WNI Eks-ISIS. Pihak pengungsian bahkan mendesak dunia internasional memulangkan warganya.

Otoritas Kurdi yang selama ini mengurus pengungsi eks ISIS pun mendesak dunia internasional untuk memulangkan warganya ke negara asal. Sikap tak acuh internasional dirasa menjadi beban, sebab mereka harus mengurus para pengungsi ketika mereka juga sedang memperbaiki kehidupannya. (Berita 6, paragraf 6)

Isi dari berita ini sama sekali tidak mengandung opini

jurnalis, murni dari fakta lapangan dan wawancara. Sedangkan pada diksi, “kita-mereka” beberapa kali muncul, tapi bukan berarti tindakan provokasi.

Tirto memasukkan narasumber dari berbagai sudut pandang, yakni pemerintah dan pengamat. Masing-masing pihak memiliki porsi yang seimbang, walaupun terlihat jelas bahwa Tirto mendukung pemulangan WNI Eks-ISIS. Pemerintah lagi-lagi hanya berkuat pada argumen “akan didiskusikan”. Meski begitu, Tirto tetap memasukkan pemerintah di dalam berita. Itu adalah prinsip *cover both side*.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan para WNI Eks-ISIS memiliki hak untuk pulang, meski memulangkannya lumayan beresiko. Negara wajib memenuhi hak warganya, apapun kondisinya. Bagi para mantan milisi ISIS, pulang ke negara asalnya sama saja selamat dari ancaman teror.

Selain itu, Indonesia sebenarnya pernah menangani terorisme, salah satunya mantan direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho pada 2018. Djoko dan keluarganya hilang pada 2015, yang diketahui bergabung ISIS yang beroperasi di Irak. Setelah pulang, Djoko mendekam di penjara selama 3,5 tahun. Sedangkan keluarganya dideredikalisasi beberapa minggu.

Fakta empiris tersebut memperlihatkan Indonesia pernah berhadapan dengan masalah ini. Begitu juga tindakan yang diambil Indonesia dengan memulangkannya dan mengadilinya di Indonesia.

3. *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral)

Bagaimanapun, pemerintah harus memulangkan WNI Eks-ISIS dengan catatan perlu meminimalisir resiko. Pemerintah yang tidak percaya diri, tentunya akan menimbulkan efek buruk jika resikonya tidak diperkecil.

Tirto memberi solusi alternatif, agar pemerintah memilih mana orang yang layak untuk dipulangkan. Bahkan lebih baik prioritaskan anak-anak dan perempuan, karena mereka terseret ikut karena lingkungannya.

"Penilaian ini memetakan mana yang levelnya very dangerous karena masih sangat radikal dan ekstrem sampai pada level yang risikonya sangat kecil," kata dia kepada reporter Tirto, Jumat (7/2/2020). (Berita 6, paragraf 15)

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Keputusan sepenuhnya ada pada pemerintah, tetapi Tirto menawarkan saran pasca pemulangan WNI Eks-ISIS. Jika pemulangan WNI Eks-ISIS terwujud, pemerintah perlu penanganan khusus setelah deradkalisasi, seperti pemberdayaan ekonomi dan kenyamanan hidup berdampingan dalam lingkungan sosial.

"Jangan sampai mereka nanti dialienasi, di-bully, atau dipersekusi sebab itu bisa menimbulkan kebencian baru," kata dia. (Berita 6, paragraf 24)

Orientasi perdamaian pada berita ini terlihat jelas, bahwa keinginan memulangkan WNI Eks-ISIS berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah. Tirto tidak memaksakan kehendaknya untuk menekan pemerintah. Tentunya ini berdasarkan definisi jurnalisme damai itu sendiri. Menurut Mpu Jaya Prama Ananda, mantan wartawan Tempo mengatakan wartawan harus berdamai dulu dengan diri sendiri sebelum meliput konflik sosial. Jurnalisme damai harus netral, meskipun sulit.¹

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto menunjukkan argumen mengapa para WNI Eks-ISIS sebaiknya dipulangkan. Narasumber yang hadir terdiri Wakil Ketua DPR RI, Mantan Komisioner Komnas Perempuan, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Kepala BNPT, dan Menkopolkham. Kepala BNPT dan Menkopolkham hanya menyatakan, yang lagi-lagi, masih membicarakan permasalahan ini.

Sedangkan penonjolan aspek realitas, yakni Tirto membuat berita dengan judul **“Mengapa 600 WNI Eks-ISIS Perlu Dipulangkan dan Diadili di Indonesia?”** menunjukkan keinginan mutlak untuk memulangkan WNI Eks-ISIS. Berita ini adalah kesimpulan dari semua berita ulasan pemulangan WNI Eks-ISIS, sehingga menciptakan sikap utuh dari Tirto.

G. Analisis Framing Berita Tirto 7

Judul : Ketua Umum PBNU Said Aqil Tolak Rencana Pemulangan 660 WNI Eks-ISIS

Terbit : 8 Februari 2020

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

TABEL 7. STURUKTUR BERITA TIRTO 7

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Ketua Umum PBNU Said Aqil Tolak Rencana Pemulangan 660 WNI Eks-ISIS	Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menolak gagasan pemulangan 660 WNI eks-ISIS.	Said beralasan, para WNI eks-ISIS tersebut sudah pergi meninggalkan negara dan membakar paspor. Selain itu, para eks-ISIS sudah melabeli semua warga Indonesia, termasuk ormas NU sebagai orang-orang yang menyembah selain Allah (thogut).	Said Aqil (Ketua Umum PBNU)

Ketua Umum PBNU Said Aqil menolak pemulangan WNI Eks-ISIS. Padahal, pada dasarnya ia adalah pemuka

¹ AJI. Jurnalisme Damai adalah Kebutuhan Semua. 2015. <http://ajidenpasar.or.id/index.php/bacaberita/102/Jurnalisme-Damai-AdalahKebutuhan-Semua.html> (diakses pada (30/11/2020)

agama yang diakui di Indonesia. Tindakan ISIS yang mengatasnamakan agama pun tetap ditolak oleh Ketua PBNU.

Narasumber yang hadir hanya Ketua Umum PBNU. Ini adalah sikap Tirto untuk mengakomodir semua pihak, walaupun tidak dalam satu berita.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Said Aqil menyebut para kombatan ISIS telah meninggalkan negara dan membakar identitas dari negaranya. ISIS juga menganggap orang Indonesia, termasuk NU sebagai penyembah selain Allah (*thogut*).

Meninggalkan negara dan membakar identitas bukan termasuk pengkhianatan, ini hanya sebuah simbol. Seperti yang disebut narasumber di berita-berita sebelumnya, ISIS bukanlah negara. Pada hukum di Indonesia, identitas seseorang akan hangus jika pindah ke negara lain.

Keinginan WNI Eks-ISIS untuk pulang, harusnya tetap diamini oleh pemerintah Indonesia. Ucapan-ucapan para WNI Eks-ISIS adalah simbolisasi pemikiran radikal. Jika tidak memulangkannya, negara telah melanggar hak asasi manusia, karena telah melantarkan warganya.

3. *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Said Aqil mencontohkan Arab Saudi dan Pakistan menolak warganya yang bergabung ISIS. Dasar hukum setiap negara pasti berbeda-beda. Hal terpenting bukanlah dengan tidak memulangkannya karena tidak ingin menimbulkan efek negatif, tetapi bagaimana negara bisa mengendalikan atau menyembuhkan pemikiran radikal seseorang. Seseorang mempunyai hak untuk pulang, dan negara wajib membimbing warganya ke arah yang lebih baik.

Indonesia memiliki jam terbang dalam menyembuhkan para mantan teroris, tetapi tidak banyak. Evaluasi kegiatan dalam membimbing mantan teroris juga tidak terbuka, sehingga Indonesia tidak percaya diri sendiri untuk memulangkan WNI Eks-ISIS.

Solahudin mempertanyakan ihwal program deradikalisasi yang selama ini berjalan tak pernah ada evaluasi secara menyeluruh. Ia mengaku tak pernah membaca studi yang cukup komprehensif tentang evaluasi program BNPT ini. (Berita 2, paragraf 28)

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Semua kalangan, bahkan anak-anak tidak layak untuk dipulangkan. Said Aqil menilai semua sama saja. Pada kasus ini, anak-anak adalah korban yang dibawa oleh keluarga atau rekannya. Anak-anak pasti tidak tahu-menahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ISIS. Bahkan anak-anak akan lebih rentan dirasuki pemikiran-pemikiran radikal ISIS. Said tidak menghiraukan itu, padahal para pengamat sudah memperkecil resiko dengan hanya memulangkan anak-anak saja.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek

realitas. Pada seleksi isu, Tirto memilih Ketua PBNU Said Aqil sebagai pihak yang menolak pemulangan WNI Eks-ISIS.

Sedangkan penonjolan aspek realitas, yakni Tirto menunjukkan judul “**Ketua Umum PBNU Said Aqil Tolak Rencana Pemulangan 660 WNI Eks-ISIS**” sebagai bentuk mengakomodir pihak yang menolak. Bahkan dalam berita ini, hanya terdapat Ketua PBNU sebagai narasumber.

H. *Analisis Framing Berita Tirto 8*

Judul : Mahfud MD Sebut Alasan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS

Terbit : 11 Februari 2020

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

TABEL 8. STURUKTUR BERITA TIRTO 8

Judul Berita	Lead Berita	Isi Berita	Narasumber
Mahfud MD Sebut Alasan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS	Pemerintah memutuskan tidak memulangkan para Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau para WNI eks-ISIS. Hal tersebut diputuskan pemerintah setelah rapat terbatas antar-kementerian di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).	Mahfud mengatakan, pemerintah tidak memulangkan para WNI karena ingin memberikan rasa aman bagi 267 juta WNI di Indonesia. Kemudian, mereka tidak ingin para FTF ini pulang menjadi virus baru bagi warga di Indonesia.	Mahfud MD (Menkopolkam)

Pemerintah yang akhirnya buka mulut terkait WNI Eks-ISIS. Polemik para WNI Eks-ISIS yang masih terdampar akhirnya diputuskan: mereka tidak akan kembali. Pemerintah memutuskannya lebih cepat, yang awalnya akan diputuskan pada Juni 2020.

Judul berita “**Mahfud MD Sebut Alasan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS**” yang ditunjukkan terlihat tegas. Padahal terdapat pengecualian pada keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI Eks-ISIS, yakni anak-anak yatim piatu akan dipulangkan.

Mahfud MD adalah satu-satunya narasumber dalam di berita ini. Prinsip *cover both side* versi Tirto mengakomodir semua pihak, tidak dalam satu berita, tetapi setiap berita yang berkesinambungan.

2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Pemerintah tidak ingin ambil resiko jika memulangkan

WNI Eks-ISIS. Memulangkan sama saja membahayakan warga Indonesia yang tidak terlibat. Namun pemerintah tetap memberi toleransi terhadap anak-anak yang terlibat.

Keputusan pemerintah memberi toleransi terhadap anak-anak adalah hal yang tepat. Pemberitaan Tirto mungkin cukup berpengaruh terhadap tindakan pemerintah. Tirto memuat berbagai argumentasi agar WNI Eks-ISIS dipulangkan, khususnya anak-anak.

Mantan Komisioner Komnas Perempuan Riri Khariroh mengungkapkan kondisi perempuan dan anak di pengungsian sangat memprihatinkan. Minimnya logistik membuat keributan jadi keseharian, bahkan seorang perempuan Indonesia ada yang tewas setelah dianiaya sesama wanita. (Berita 6, paragraf 13)

3. **Make Moral Judgment** (Membuat Keputusan Moral)

Pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa WNI Eks-ISIS. Berdasarkan data CIA, jumlahnya mencapai 689 orang, sebanyak 228 ada identitas dan teridentifikasi, 401 orang sisanya belum.

Ini adalah kemajuan besar. Usaha pemerintah untuk memulangkan WNI Eks-ISIS semakin terlihat jelas. Ini adalah proses yang konkrit dari pemerintah dalam memulangkan mantan kombatan ISIS. Namun jumlah konkrit bagi WNI yang dipulangkan belum jelas, mana yang berstatus anak-anak belum diketahui. Bahkan ketika sudah teridentifikasi sebagai anak-anak, masih ada pengecualian: hanya anak-anak yatim piatu.

Ini adalah pengecualian yang tidak adil. Anak-anak tetaplah anak-anak yang dibawa oleh keluarga atau rekannya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ISIS. Anak yatim piatu maupun yang tidak harusnya mendapat perlakuan yang sama. Mungkin keputusan tidak membawa anak-anak yang masih memiliki orangtua, agar kondisi mentalnya tidak terganggu jika berpisah dengan orangtuanya.

4. **Treatment Recommendation** (Menekankan Penyelesaian)

Keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI Eks-ISIS adalah mutlak dan tidak akan membahasnya lagi. Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan mereka, kecuali yang berstatus anak-anak yatim piatu.

Berdasarkan empat elemen *Framing*, berita ini juga dapat dipandang dari dua dimensi besar oleh Robert N. Entman, yakni tentang seleksi isu dan penonjolan aspek realitas. Pada seleksi isu, Tirto lagi-lagi hanya menunjukkan satu narasumber pemerintah, yakni Menkopolkam Mahfud MD.

Sedangkan penonjolan aspek realitas, yakni Tirto menunjukkan alasan pemerintah tidak memulangkan WNI Eks-ISIS. Walaupun Tirto menonjolkan “**Mahfud MD Sebut Alasan Pemerintah Tak Pulangkan WNI Eks ISIS**”, pemerintah memberi toleransi terhadap anak-anak yatim piatu yang terlibat. Namun ini juga bermasalah, lantaran hanya anak yatim piatu saja, anak yang masih memiliki orangtua tidak diikutsertakan pulang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang seri pemberitaan pemulangan WNI Eks-ISIS, Tirto memandang isu tersebut dengan perspektif HAM. ISIS akhirnya terpuruk, membuat anggotanya – termasuk WNI – harus mengungsi demi menyelamatkan diri.

Kesimpulan dari pembingkaiannya pemberitaan Tirto terhadap realitas pemulangan WNI Eks-ISIS, yang dapat peneliti terjemahkan adalah sebagai berikut:

1. **Define Problem**, Tirto mendefinisikan masalahnya dengan melihat kekalahan ISIS, sehingga WNI yang tergabung harus dipulangkan. Pemerintah yang punya wewenang ini didorong agar bisa memulangkan mereka. Meskipun Tirto menginginkan WNI Eks-ISIS dipulangkan, narasumber dari pemerintah dan pengamat diberi ruang.
2. **Diagnose Causes**, Tirto melihat penyebab WNI Eks-ISIS harus dipulangkan karena ISIS telah kalah. Jika enggan dipulangkan, akan berakibat fatal terhadap keselamatan anggota yang masih tersisa. Tempat pengungsian para mantan ISIS beresiko diserang pada waktu tertentu. Tirto menekankan aspek HAM dalam memandang isu tersebut.
3. **Make Moral Judgment**, yang ditunjukkan Tirto bahwa anak-anak dan perempuan yang tergabung dengan ISIS merupakan korban dari propaganda atau dorongan keluarga. Pemahaman yang awam membuat mereka mudah terjerumus.
4. **Treatment Recommendation**, dalam melihat suatu isu, media harus menekankan penyelesaian atau solusi yang ditawarkan. Tirto melihat pemerintah tidak punya kapabilitas dan akan kewalahan jika semua WNI Eks-ISIS dipulangkan. Tirto pun menawarkan alternatif lain, yakni pulangkan saja anak-anak, karena kadar pemikiran radikalnya dinilai masih redah sehingga masih mudah disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chandler, Michael dan Rohan Gunaratna. 2007. *Countering Terrorism: Can We Meet the Threat of Global Violence?*. London: Reaktion Books
- [2] Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: Lkis
- [3] Eriyanto. 2011. *Analisis Isi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] Herdiansyah, H. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- [5] Littlejohn, Stephen W. dan Foss, Karen A. 2009. *Teori Komunikasi* (Terjemahan Muhammad Yusuf Hamdan). Jakarta: Salemba Humanika.
- [6] M. Romli, Asep. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.

- [7] Malik, Abdul. 2013. *Komunikasi Massa*. Makasar: Alauddin University Press.
- [8] Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [9] Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- [10] Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Sukandarrumidi.
- [11] Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- [12] Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (terj.)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] Rivers, William L, Jay W. Jensen, Theodore Peterson. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- [14] Romli, Asep Syamsul M. 2008. *Kamus Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [15] Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [16] Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [17] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta.
- [18] Syahputra, I. 2006. *Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: Pilar Media.
- [19] Wright, Charlers R. 1988. *Sosiologi Komunikasi Massa (Terjemahan Liliwati Trimio)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [20] Sobur, Alex. (2000). Kebenaran Sebagai Prasyarat Etis Pers. MediaTor, Vol. 1 Edisi 1
- [21] (Dikutip
<http://internationalpeaceandconflict.org/forum/topics/article-from-jakelynych-what>) 28 Juni 2020, 02.36 WIB.
- [22] (Dikutip
<http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/isis-iraq-twitter-social-mediastrategy/372856/>) 22 November 2020, 23.06 WIB
- [23] (Dikutip
<https://www.vox.com/world/2017/9/11/16288824/al-qaeda-isis-911>) 25 November 2020, 00.20 WIB
- [24] (Dikutip
<https://abcnews.go.com/International/wireStory/bad-weather-militants-syria-wind-61676459>) 25 November 2020, 01.02 WIB
- [25] (Dikutip
<http://ajidenpasar.or.id/index.php/bacaberita/102/Jurnalisme-Damai-AdalahKebutuhan-Semua.html>) 30 November 2020, 16.49 WIB